

Implementasi Program Dandan Omah di Kelurahan Bulak Banteng Kota Surabaya

Asiel Bernike Remalya¹, Lucy Cita Widya Amanda³

Rizky Buana Sari³, Widya Larasati⁴, Vidya Imanuari Pertiwi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur

asielbernike69@gmail.com¹, alucyyy5@gmail.com², rzkysari9@gmail.com³

widyalarasati74696@gmail.com⁴, vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id⁵

ABSTRACT

The city of Surabaya, as the capital of East Java province, still faces unresolved poverty issues. According to data from the National Socio-Economic Survey, Surabaya experienced the highest growth in uninhabitable houses between 2016 and 2020, reaching 27.11 percent. The Surabaya City Government, as an autonomous region with rights and obligations, demonstrates its commitment to meeting the basic needs of its residents through a housing program known as the Uninhabitable House Program or 'Dandan Omah.' In Bulak Banteng Subdistrict, where inadequate housing conditions persist, 24 households received assistance through the home improvement program in 2023. This research applies Richard Matland's theory, which includes four indicators of policy implementation: policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy. The first indicator suggests that this policy effectively improves the welfare of Bulak Banteng residents by providing habitable homes. However, implementation accuracy remains a challenge, as it does not fully align with established regulations and guidelines, particularly in document processing. Despite this, the chosen intervention targets match the plan and avoid overlap with other programs, representing an enhancement over previous policies. Additionally, the policy environment involves interactions between the Surabaya City Public Housing and Settlement Area, the Defense Department (DPRKPP), the Bulak Banteng Subdistrict, and the Bulak Banteng Home Repair Technical Group (KTPR). External factors, including public perceptions, also influence the policy's effectiveness.

Keywords: Dandan Omah; Policy Implementation; Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

ABSTRAK

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang belum terselesaikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, Surabaya mengalami pertumbuhan rumah tidak layak huni tertinggi pada tahun 2016 hingga 2020, yaitu mencapai 27,11 persen. Pemerintah Kota Surabaya sebagai daerah otonom yang memiliki hak dan kewajiban menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya melalui program perumahan yang dikenal dengan Program Rumah Tidak Layak Huni atau 'Dandan Omah.' bertahun-tahun, 24 rumah tangga menerima bantuan melalui program perbaikan rumah pada tahun 2023. Penelitian ini menerapkan teori Richard Matland yang mencakup empat indikator implementasi kebijakan: tepat kebijakan, tepat implementasi, tepat target, dan tepat lingkungan. Indikator pertama menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif meningkatkan kesejahteraan warga Bulak Banteng melalui penyediaan rumah layak huni. Namun, keakuratan penerapannya masih menjadi tantangan karena tidak sepenuhnya sejalan dengan peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan, khususnya dalam pengolahan dokumen. Meskipun demikian, target intervensi yang dipilih sesuai dengan rencana dan menghindari tumpang tindih dengan program lain, sehingga meningkatkan dibandingkan kebijakan sebelumnya. Selain itu, lingkungan kebijakan melibatkan interaksi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surabaya, Kementerian Pertahanan (DPRKPP), Kecamatan Bulak Banteng, dan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) Bulak Banteng. Faktor eksternal, termasuk persepsi masyarakat, juga mempengaruhi efektivitas kebijakan.

Kata kunci : Dandan Omah; Implementasi Kebijakan; Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara yang berkembang, termasuk Indonesia. (Made et al, 2023). Menurut Suyanto dalam (Mei et al, 2024) Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi ketika suatu kelompok hanya bisa memenuhi kebutuhan yang dasar, contohnya seperti sandang, pangan, dan papan. Sementara itu, kemiskinan relatif muncul akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata sehingga tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat dan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, kemiskinan juga tidak hanya terkait dengan rendahnya tingkat konsumsi dan pendapatan, tetapi juga berhubungan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan manusia. Keterbatasan lapangan kerja juga menyebabkan banyak orang menjadi pengangguran sehingga diklasifikasikan sebagai kategori miskin (Triani et al, 2020)

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 menurun menjadi 25,90 juta orang, berkurang sebanyak 0,46 juta orang dibandingkan September 2022, dan 0,26 juta orang dibandingkan Maret 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai 9,36%, turun 0,21 poin dari September 2022 dan 0,18 poin dari Maret 2022. Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia yakni sebanyak 4,19 juta orang pada Maret 2023 dan tingkat kemiskinan sebesar 10,35%. Kota Surabaya merupakan salah satu kota penyumbang angka kemiskinan di Jawa Timur.

Kota Surabaya merupakan menjadi ibukota provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya terbebas dari permasalahan terkait kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kota Surabaya menunjukkan tren penurunan setiap tahun. Pada tahun 2022, angka kemiskinan turun sebanyak 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa. Kemudian tahun 2023, di mana angka kemiskinan di Surabaya turun lagi menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah penduduk miskin di Surabaya namun jumlahnya masih cukup besar. Data kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih tinggi mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi cenderung rendah.

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, salah satunya adalah migrasi penduduk dari desa ke kota, khususnya ke kota Surabaya (Murdani and Aditya, 2023). Berdasarkan informasi dalam situs Satu Data yang dikelola pemerintah kota Surabaya, terhitung pada bulan Februari 2022, sebanyak 2,97 juta jiwa mendiami kota Surabaya. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan penduduk total kota Surabaya berdasarkan data penduduk lokal dan penduduk migrasi yang telah dijumlahkan. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan permintaan akan tempat tinggal. Namun, karena ketersediaan lahan tidak mencukupi untuk memenuhi pertumbuhan tersebut, harga lahan pun menjadi lebih tinggi. Peningkatan harga lahan ini menjadi penyebab utama dari banyaknya permukiman kumuh yang bermunculan (Kusumaningsih et al, 2019). Hal tersebut memperparah kondisi kehidupan bagi masyarakat yang berada dalam

kemiskinan. Mereka terpaksa tinggal di rumah-rumah tidak layak huni karena terbatasnya akses terhadap perumahan yang layak dan kondisi lingkungan yang memadai.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Surabaya mencatat pertumbuhan rumah tidak layak huni tertinggi sepanjang 2016-2020 sebesar 27,11 persen. Di kota dengan 971.659 kepala keluarga ini, terdapat 391.363 rumah tidak layak huni. Tateki Yoga dkk. dalam (Gigih, 2024) menyatakan bahwa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, terutama tempat tinggal layak huni, menyebabkan keluarga miskin tidak dapat berfungsi dengan baik. James Krieger dalam (Kuntjorowati, 2021) mendefinisikan rumah yang tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi standar keamanan bangunan, memiliki luas di bawah standar minimum, dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk penghuninya.

Peran rumah (tempat tinggal) sendiri merupakan aspek yang esensial dan harus dipenuhi. Rumah sebagai tempat tinggal yang dinamis memiliki peranan penting, karena tidak hanya sebagai tempat perlindungan, tetapi juga sebagai tempat berlindung terhadap kondisi alam yang seringkali tidak menguntungkan. (Mugiarti, 2023). Rumah juga berfungsi sebagai pusat kegiatan keluarga, pembinaan kehidupan bersama, serta menciptakan kerangka bagi interaksi sosial dan struktur masyarakat (Kuntjorowati 2021). Kepemilikan rumah layak huni merupakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia”

Berdasarkan peraturan itu, Pemerintah Kota Surabaya sebagai wilayah otonom yang memiliki hak dan kewajiban, menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya melalui program perumahan yang dikenal sebagai Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau Dandan Omah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik rumah bagi keluarga miskin. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 yang mengalami perubahan menjadi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau Dandan Omah di Kota Surabaya bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan fokus pada perbaikan kondisi fisik rumah sehingga layak huni, sehat, dan aman bagi keluarga miskin di Kota Surabaya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya mengelola dan bertanggung jawab atas program Dandan Omah dan dibantu oleh Kelurahan melalui tim Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) untuk menangani rumah tidak layak huni. Program Dandan Omah di Kota Surabaya merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kondisi rumah yang tidak layak huni melalui semangat gotong royon sehingga memberikan manfaat tidak hanya bagi penerima manfaat tetapi juga meningkatkan perekonomian

masyarakat sekitar. Program Dandan Omah ini telah berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Sejak peluncuran Program Dandan Omah pada 31 Maret 2021 hingga akhir tahun 2022 sebanyak 1.474 rumah tidak layak huni telah diperbaiki. Pada tahun 2023, jumlah ini meningkat menjadi 3.140 unit melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan daerah-daerah yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan. Penetapan ini berdasarkan hasil Kajian Penentuan Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya. Daerah-daerah prioritas ini adalah daerah permukiman di Kota Surabaya yang memiliki potensi, masalah, dan karakteristik khusus yang memerlukan penanganan prioritas (Ardi and Rahmawati, 2019). Salah satu fokus utama adalah memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni (Rutilahu) sesuai dengan standar prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. (Setyawan and Prathama, 2024). Berikut adalah beberapa kelurahan yang masuk pada prioritas 1 penerima program Dandan Omah di Kota Surabaya

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Program Dandan Omah menurut Kelurahan yang Masuk Dalam Golongan 1 Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Permukiman di Kota Surabaya

No.	Kelurahan Prioritas 1	Jumlah Penerima Manfaat	
		2022	2023
1	Sawunggaling	4	13
2	Kenjeran	5	10
3	Kedung Cowek	5	24
4	Bulak Banteng	7	24
5	Rungkut Kidul	5	7

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, 2024

Berdasarkan data di atas, terdapat bukti bahwa masih ada beberapa masyarakat di Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Bulak Banteng yang tinggal dalam kondisi rumah yang kurang layak meskipun telah dilaksanakan program Dandan Omah pada tahun 2022-2023. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat program Dandan Omah di Kelurahan Bulak Banteng lebih banyak dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang termasuk dalam Golongan 1 Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman di Kota Surabaya.

Penelitian ini didasari oleh research gap yang teridentifikasi dalam penelitian sebelumnya seperti penelitian menurut Bonifasius dan Galih (2021) menyatakan peran pemerintah dalam program rehabilitasi atau perbaikan sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya dianggap berhasil karena tepat dalam mengidentifikasi masyarakat miskin

sebagai target utama untuk memperbaiki rumah mereka, meningkatkan kualitas hunian. Kemudian penelitian menurut Novia Nilam (2022) menyatakan bahwa implementasi Program Tahu Panas dalam merehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Surabaya berjalan baik, meskipun terdapat kendala terutama pada sumber daya manusia dan material bangunan yang memperlambat pembangunan sesuai jadwal.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah perubahan dalam peraturan atau kebijakan terkait program perbaikan rumah tidak layak huni. Pada penelitian sebelumnya, program tersebut disebut sebagai Tahu Panas (Tak Takut Kehujan dan Tak Takut Kepanasan) sementara pada penelitian ini program tersebut disebut sebagai Dandan Omah. Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan terkait implementasi kebijakan Program Dandan Omah Di Kelurahan Bulak Banteng Kota Surabaya menggunakan teori dari Richard Matland yang mencakup empat indikator implementasi kebijakan, yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan yang tujuannya adalah untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi Program Dandan Omah Di Kelurahan Bulak Banteng Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Sindy et al, 2023) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah acuan penelitian yang menghasilkan informasi ekspresif dari ucapan, perilaku dan gubahan individu yang diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan menurut Richard Matland yang mencakup empat indikator utama, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Lokus dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Bulak Banteng Kota Surabaya karena pada daerah ini mempunyai jumlah penerima program Dandan Omah terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang termasuk dalam Golongan 1 Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman di Kota Surabaya. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan penelitian *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah Staf Bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Bulak Banteng, KTPR, dan penerima Program Dandan Omah. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara data sekunder berasal dari jurnal dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (2014) yang mencakup reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Bulak Banteng terletak di Kota Surabaya, tepatnya di Kawasan Kenjeran, dengan luas wilayah 600.000 m² dan lebar jalan 4 m. Kelurahan Bulak Banteng terbagi menjadi 8 Rukun

Warga (RW) dan 70 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Bulak Banteng merupakan penerima manfaat Program Dandan Omah terbanyak berdasarkan Kecamatan yang termasuk dalam Golongan 1 Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Permukiman di Lingkungan Kota Surabaya.

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan setelah kebijakan diresmikan, melibatkan upaya untuk menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. (Darmadi et al. 2021). Implementasi Program Dandan Omah ini telah tertuang dalam Perwali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya. Pelaksanaan program Dandan Omah di Kecamatan Bulak Banteng Kota Surabaya akan dikaji dengan menggunakan teori Richard Matland sebagai landasan pemeriksaan data yang terdiri dari empat indikator, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Berikut adalah rincian yang lebih mendalam tentang keempat indikator utama tersebut berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan.

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan berkaitan dengan mengukur tingkat kapasitas program atau kebijakan yang mencakup segala permasalahan terkait. Kebijakan yang dibuat harus mampu menyelesaikan isu-isu yang muncul dengan memenuhi tiga kriteria: efektivitas kebijakan dalam memecahkan masalah, kesesuaian antara kebijakan dengan karakteristik masalah, dan kesesuaian antara kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan karakteristik masalah tersebut (Gigih, 2024). Sependapat dengan Dye, kebijakan adalah langkah-langkah yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah mempunyai hak untuk memutuskan atau membuat pengaturan yang harus dipatuhi dan dipertimbangkan secara terbuka (Hayat, 2018)

Program Dandan Omah di Kota Surabaya, awalnya diatur oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya, kemudian diperbarui menjadi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya, dan selanjutnya mengalami perubahan kedua menjadi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Selama pelaksanaannya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya bertanggung jawab dan mengelola kegiatan ini. Dinas ini dibantu oleh pihak Kelurahan yang membentuk Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) sebagai tim pelaksana kegiatan Rutilahu. Lurah, KTPR, dan tokoh masyarakat lokal bersinergi untuk menetapkan target program guna mendapatkan bantuan dalam memperbaiki lingkungan dan rumah yang tidak layak huni. Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) dibentuk melalui konsultasi dengan mitra di wilayah kelurahan setempat. Masalah-masalah yang sering muncul terkait ketepatan kebijakan meliputi:

1. Perubahan usulan dari kelurahan
2. Dokumen yang tidak lengkap dari penerima manfaat
3. Masalah dalam dokumen bukti kepemilikan hak yang sah
4. Konflik internal atau sengketa dalam keluarga penerima manfaat

5. Masalah anggaran, di mana jangka waktu yang lama antara termin 1 dan termin 2 sering menyebabkan tukang-tukang pembangunan Program Dandan Omah mencari pekerjaan lain saat menunggu termin 2, sehingga proyek sering tertunda sementara.

Mengingat penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketepatan kebijakan, yaitu kapasitas program Dandan Omah untuk menangani berbagai masalah kualitas tempat tinggal, dapat ditingkatkan melalui koordinasi yang terstruktur antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Kelurahan Bulak Banteng, dan KTPR untuk menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho dan Pradana bahwa koordinasi bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan menghilangkan tumpang tindih dan kekacauan (Nugroho and Pradana, 2021)

2. Ketepatan Pelaksanaan

Pada indikator ini, Richard Matland dalam (Purwanti et al. 2019) menjelaskan bahwa pelaksanaan dari sebuah kebijakan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja, melainkan terdapat 3 aktor atau lembaga yang bisa menjadi pelaksana suatu kebijakan. Tiga aktor tersebut antara lain, (1) Pemerintah, sebagai pelaksana kebijakan, terutama pada suatu kebijakan yang sifatnya monopoli, contohnya seperti kartu identitas penduduk, atau memiliki tingkat politik keamanan yang tinggi seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dijalankan oleh pemerintah, (2) Pemerintah-masyarakat, dimana antara pemerintah dengan masyarakat sebaiknya saling bekerja sama atau berkoordinasi dalam suatu kebijakan, terlebih lagi dalam suatu kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya dijalankan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat., (3) Pemerintah - swasta, yang mana selain koordinasi dengan masyarakat, pemerintah selaku pemimpin juga dapat melakukan koordinasi dengan pihak swasta untuk membantu kelancaran program atau suatu kebijakan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.

Sesuai dengan indikator ketepatan pelaksanaan di atas bahwa dalam pelaksanaan kebijakan terdapat berbagai sub indikator pengukuran, yang pertama yaitu kebijakan-kebijakan yang sifatnya monopoli dan kebijakan yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi sebaiknya dikelola oleh pemerintah. Dari hasil penelitian kami di lapangan, menunjukkan bahwa pada program Dandan Omah ini memang membutuhkan beberapa aktor terkait dalam pelaksanaannya, terlebih lagi dalam pengumpulan dokumen yang bersifat penting seperti dokumen kependudukan, dimana tidak semua orang dapat mengakses atau mengelolanya, sebaiknya dikelola oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Hal ini mencerminkan bahwa program Dandan Omah telah memenuhi sub indikator tersebut, di mana operasionalnya terbatas pada pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan DPRKPP Kota Surabaya tanpa intervensi dari pihak luar. Oleh karena itu, program Dandan Omah yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan DPRKPP memiliki tingkat keamanan politik yang tinggi.

Disamping itu, sesuai dengan indikator yang kedua pada ketepatan pelaksanaan merujuk pada sejauh mana suatu program atau kebijakan memperhitungkan kesejahteraan masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. (Kadji 2015)

Menurut temuan kami di lapangan dan informasi yang kami dapatkan dari sesi wawancara, hasilnya adalah dengan adanya program Dandan Omah ini khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin tentunya sudah memadai untuk mengakomodasi kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat yang tidak luput dalam pelaksanaan program Dandan Omah ini menambah nilai plus bagi pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh perwakilan pihak KTPR, pihak kelurahan, serta masyarakat Bulak Banteng yang sependapat bahwa : “Program Dandan Omah ini sangat bagus, karena program ini dapat membantu kesejahteraan warga Bulak Banteng dimana terdapat banyak rumah yang tidak layak huni dan warga yang berpenghasilan rendah dan dikategorikan sebagai warga miskin yang tidak bisa memperbaiki rumahnya. Selain itu, masyarakat juga ikut andil dalam pelaksanaan program ini yaitu dengan membantu penerima maupun kuli bangunan yang memperbaiki rumah. Tetangga penerima juga turut ikut membantu melakukan pembongkaran dan mengemas barang. Kadangkala juga tetangga juga ikut serta untuk memasak bersama untuk makan kuli atau tukangnyanya. Kemudian ada juga yang membantu untuk memberikan tempat singgah sementara selama proses pembangunan dilakukan. Selain itu, usulan-usulan masyarakat untuk program ini juga direspon baik oleh pihak DPRKPP dan Pemerintah Kota Surabaya sehingga program ini selama pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar”. (Wawancara, 22 Mei 2024)

Sub indikator yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan yang memiliki tujuan untuk mengarahkan kegiatan masyarakat (Kadji, 2015). Hal tersebut didasari dari sejumlah besar rumah yang tidak memenuhi standar hunian yang layak di Kota Surabaya terlebih lagi di kawasan pesisir yang mana dalam pelaksanaan program ini. Tentunya, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Surabaya, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas utama program tersebut.. Temuan dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan melalui program Dandan Omah berjalan dengan cukup optimal dan kondusif. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Bersama DPRKPP, Pihak KTPR, Kelurahan serta masyarakat Surabaya dalam berjalannya program ini. Kerjasama dengan masyarakat inilah yang dapat membantu program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Pihak DPRKPP Kota Surabaya sendiri juga rutin mengadakan evaluasi setiap tahunnya untuk membahas berjalannya program Dandan Omah yang telah dilakukan sebagai perbaikan untuk kedepannya. Begitu pula dengan pihak kelurahan selaku penanggung jawab program di lapangan, selalu berusaha memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan program ini.

Dari segi teknis, Pemerintah Kota Surabaya melalui DPRKPP telah menyediakan fasilitas yang cukup baik dan memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan program Dandan Omah. Fasilitas tersebut berupa pemberian dana untuk perbaikan rumah sebesar 35 juta rupiah dengan masa perbaikan selama 20 hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Fika Rahmawati, S.T, selaku staf bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan (DPRKPP) Kota Surabaya bahwa: “Pemerintah Kota Surabaya selalu berfokus pada kesejahteraan warganya, sehingga program Dandan Omah ini akan terus diupayakan

untuk dapat membantu warga Kota Surabaya yang termasuk kategori miskin atau tidakmampu secara mandiri untuk memperbaiki rumah tempat tinggalnya. Dimana setiap rumah mendapat dana perbaikan sebesar 35 juta rupiah dan prosesnya dilaksanakan selama kurun waktu 20 hari. Selain itu, seluruh kelurahan yang ada di Surabaya diupayakan untuk dapat menerima manfaat dari program Dandan Omah ini, termasuk salah satunya yaitu pada kelurahan Bulak Banteng”. (Wawancara, 22 Mei 2024)

Secara prinsip, setiap implementasi kebijakan tidak hanya memiliki aspek positif tetapi juga menghadapi tantangan dan kelemahan yang mungkin timbul. Demikian juga dengan program Dandan Omah, yang pasti mengalami beberapa kendala selama proses pelaksanaannya yaitu mulai dari masyarakat yang merasa bahwa RAB yang diberikan kurang atau saat sudah mulai pengerjaan, kuli bangunannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga, pemerintah sebagai entitas yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan selalu berusaha untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian selama pelaksanaan kebijakan ini. Dari penjelasan mengenai ketepatan pelaksanaan ini, dapat disimpulkan bahwa berjalannya kebijakan program Dandan Omah yang diusung oleh Pemerintah Kota Surabaya dan DPRKPP dari sisi membantu mensejahterakan masyarakat sudah cukup bagus dan optimal. Namun, dalam pelaksanaannya yang seharusnya mengikuti aturan dan pedoman yang telah ditetapkan, sering kali menghadapi tantangan atau hambatan dari pihak masyarakat yang terkadang masih mengeluh bahwa dana yang diberi tidak cukup karena semakin mahalnya biaya untuk membeli bahan-bahan perbaikannya, hingga tukang atau kuli bangunan yang tidak sesuai dengan target pengerjaan sehingga membuat pekerjaan menjadi lambat.

3. Ketepatan Target

Berpedoman pada teori oleh Richard Matland dalam (Purwanti et al. 2019) ketepatan target mencakup tiga sudut pandang, yaitu apakah target intervensi sesuai dengan rencana awal, tidak tumpang tindih dengan intervensi lainnya, dan tidak berbenturan dengan kebijakan lain, apakah target telah dipersiapkan untuk intervensi, dan apakah pendekatan intervensi yang diterapkan merupakan sesuatu yang belum terpakai atau merupakan peningkatan dari pengaturan sebelumnya.

Aspek utamanya adalah apakah target sudah sesuai dengan rencana awal, tidak tumpang tindih dalam kebijakan lain, dan tidak bertentangan dengan kebijakan lain. Kebijakan program Dandan Omah sudah tepat karena sesuai dengan Perwali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Kriteria Utama bagi Penerima Manfaat Pemajuan Rutilahu diperjelas seperti dibawah ini :

- a. Penduduk Daerah;
- b. Memiliki pendapatan keluarga dibawah UMK, dengan memprioritaskan untuk keluarga miskin dan pra miskin; dan
- c. Belum pernah mendapat bantuan perbaikan rutilahu, kecuali untuk korban bencana.

Pada program Rutilahu atau Dandan Omah yang diperinci terlihat bahwa target sasaran telah ditetapkan dengan jelas dimana penentuan kriteria manfaat ini telah mempertimbangkan data yang tersedia dalam aplikasi Si Gamis dan sesuai dengan fokus program untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya penerima manfaat

program Danda Omah di kelurahan Bulak Banteng mengalami kenaikan sejak program tersebut diluncurkan yakni pada tahun 2022 sebanyak 7 penerima manfaat dan tahun 2023 sebanyak 24 penerima manfaat. Hal ini terlihat bahwa target intervensi sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tidak mencakup program bantuan lain yang mempunyai kriteria khusus dan jatah subsidi. Program ini menjamin penerimanya benar-benar masuk dalam kategori yang dipersyaratkan sehingga intervensi yang diberikan tepat sasaran dan tidak berselisih dengan kebijakan lain.

Aspek kedua, apakah target dalam keadaan siap untuk diintervensi. Proses seleksi penerima manfaat perlu dilakukan dengan cermat, mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan, seperti yang tercantum dalam Prasyarat bagi penerima manfaat perbaikan Rutilahu antara lain:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga serta berdomisili di rumah yang diusulkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat;
- b. kondisi rumah tidak layak huni/korban kebakaran dan/atau bencana;
- c. rumah berdiri di atas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah;
- d. mendapatkan rekomendasi dari Lurah; dan
- e. Surat pernyataan bermaterai cukup, berisi:
 1. rumah/tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki;
 2. belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah di kecualikan untuk pembuatan jamban sehat dan bencana;
 3. kesediaan tidak menjual atau menyewakan rumah hasil rehabilitasi dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun; dan
 4. pendapatan keluarga dibawah UMK.

Perangkat setempat seperti RT, RW, dan Kelurahan Bulak Banteng mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan program pemerintah di tingkat masyarakat. Salah satu langkah yang mereka lakukan adalah mengadakan sosialisasi sebelum pelaksanaan program Dandan Omah. Sosialisasi memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan terhadap calon penerima manfaat mengenai tujuan dan manfaat dari program tersebut. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya program ini dalam meningkatkan kualitas hunian mereka dan juga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Selain itu, sosialisasi juga memiliki tujuan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran dan kontribusi yang mereka dapat berikan dalam mendukung keberhasilan program. Masyarakat diberikan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam program ini baik melalui memberikan informasi yang akurat, mendukung proses pelaksanaan, hingga memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan. Kerjasama yang dilakukan oleh semua stakeholders yang terlibat dalam implementasi program Dandan Omah akan memengaruhi kemampuan program untuk berintegrasi dengan baik dan mencapai tujuan sarannya secara efisien. Koordinasi ini juga dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih antara program-program yang ditujukan kepada sasaran yang sama, supaya program tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan juga efisien. (Azhari, 2022).

Program Dandan Omah ini tidak hanya menawarkan bantuan dalam bentuk perbaikan fisik rumah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan keberhasilan program. Hal tersebut sejalan dengan teori Yadaf dalam (Rahmawati et al. 2024) yang mendorong partisipasi sukarela masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa tenaga, dana, ide, dan bentuk bantuan lainnya juga menjadi faktor krusial, seiring dengan keuntungan yang akan dirasakan oleh setiap individu yang ikut terlibat. Masyarakat sekitar (tetangga) penerima manfaat turut membantu dalam pembongkaran rumah dan menyediakan tempat tinggal sementara bagi penerima manfaat Dandan Omah ini. Kadangkala juga tetangga juga ikut serta untuk memasak bersama untuk makan kuli/tukangnya. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat menunjukkan bahwa kondisi sosial target mendukung program ini sehingga dalam keberlangsungan program dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Program Dandan Omah ini juga membuka lapangan pekerjaan kepada warga Kelurahan Bulak Banteng untuk menjadi tukang/kuli dalam pembangunan rumah tersebut sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan bagi penerima manfaat namun masyarakat sekitarnya juga sehingga akan mengurangi angka pengangguran. Toko bangunan di sekitar Kelurahan Bulak Banteng juga turut menyuplai bahan material untuk program Dandan Omah ini sehingga akan menyebabkan perputaran ekonomi di wilayah tersebut.

Aspek Ketiga apakah intervensi kebijakan yang diterapkan adalah sesuatu yang baru atau merupakan pembaruan dari kebijakan sebelumnya yakni Tahu Panas (Tak Takut Kehujan dan Tak Takut Kepanasan). Program Dandan Omah merupakan bentuk intervensi yang memperbaiki dan meningkatkan kebijakan sebelumnya. Sebelumnya, program perbaikan rumah tidak layak huni telah dijalankan oleh Dinas Sosial, tetapi kemudian dipindahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi dengan tupoksi konstruksi dan perumahan. Selain itu, prosedur administrasi juga disederhanakan, seperti pengurangan jumlah termin pembayaran dari tiga menjadi dua, dan pengembangan sistem E-Rutilahu untuk pengunggahan persyaratan secara online. Inovasi ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan ini tidak sekedar mengulang kebijakan lama, tetapi memperkenalkan perbaikan yang signifikan untuk memperoleh sebuah hasil yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan teori ketepatan sasaran menunjukkan bahwa Program Dandan Omah telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Target intervensi yang dipilih sesuai dengan rencana dan tidak adanya tumpang tindih dengan program lain, penerima manfaat siap menerima intervensi baik secara fisik maupun sosial, dan kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dengan pendekatan yang lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, program ini dapat dikatakan tepat sasaran dan berpotensi besar untuk mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas perumahan dan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Surabaya.

4. Ketepatan Lingkungan

Menurut Richard Matland dalam penelitian (Purwanti et al. 2019) disebutkan bahwa terdapat dua jenis lingkungan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan pertama yaitu lingkungan kebijakan atau lingkungan internal. Lingkungan internal ini meliputi interaksi atau komunikasi yang terjalin antara lembaga

perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Lingkungan selanjutnya yaitu lingkungan eksternal kebijakan yang meliputi persepsi publik mengenai implementasi dari suatu kebijakan yang telah dijalankan. Keberhasilan sebuah implementasi yang didukung oleh lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal akan memberikan dampak bagi kebijakan tersebut secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, lingkungan kebijakan internal yang positif akan menghasilkan sebuah pandangan yang positif dan berpengaruh pada lingkungan eksternal kebijakan, yang dimana akan menjadi dampak positif pada keberhasilan kebijakan.

Berpedoman teori tersebut, maka implementasi program dandan omah di Kelurahan Bulak Banteng Kota Surabaya khususnya pada indikator ketepatan lingkungan memperoleh hasil bahwa lingkungan internal dan eksternal kebijakan telah terjalin dengan baik. Kebijakan ini berada pemerintah daerah Kota Surabaya yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Selanjutnya dibawah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan Kota Surabaya (DPRKPP) untuk mendukung keberhasilan program ini. Pertama, dalam lingkungan internal kebijakan dibuktikan dengan interaksi yang terjalin oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan Kota Surabaya (DPRKPP) dengan Kelurahan Bulak Banteng dan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) Bulak Banteng untuk mendukung kelancaran program ini. KTPR Bulak Banteng selaku pelaksana kebijakan yang berpartisipasi langsung dalam pembangunan selalu berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Cipta Karya dan disertai dengan DPRKPP yang melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala pada proses pembangunan rumah. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang meliputi persepsi publik pada kebijakan ini. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pada wawancara tersebut pihak Kelurahan Bulak Banteng, KTPR Bulak Banteng dan warga Bulak Banteng sebagai penerima program memiliki persepsi bahwa program ini membantu masyarakat khususnya masyarakat miskin pada Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka. Masyarakat miskin yang sebelumnya memiliki banyak fokus, seperti fokus merenovasi rumah yang rusak sehingga perekonomian mereka selalu terkuras, melalui program ini berdampak signifikan pada ekonomi warga karena masyarakat bisa terfokus pada perbaikan ekonominya tanpa memikirkan tempat tinggal yang tidak layak.

Melalui program ini, peningkatan kinerja dan penyesuaian anggaran harus selalu dilakukan untuk meningkatkan lingkungan kebijakan positif baik secara internal dan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan positif akan mengurangi adanya konflik sosial yang terjadi pada masyarakat dan berdampak pada persepsi publik yang baik untuk perubahan masyarakat dan keberhasilan kebijakan (Irwandi and Chotim, 2017)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan penataan restorasi rumah kumuh melalui Program Omah Dandan di Kecamatan Bulak Banteng Kota Surabaya diputuskan dengan memanfaatkan pertunjukan hipotetis Matland dengan penanda “empatkanan”. Yang utama adalah ketepatan pendekatan, yang nampaknya muncul bahwa dari segi ketepatan penataan tersebut dibenahi, dimana

hadirnya kebijakan ini mampu membantu kesejahteraan masyarakat Bulak Banteng untuk mewujudkan rumah layak huni untuk ditinggali. Momen, khususnya ketepatan eksekusi, dimana pada umumnya eksekusi adalah ganti rugi. Dimana dari segi kesejahteraan warga sangat besar dan ideal. Namun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan arahan atau tata tertib yang telah ditetapkan, dimana terkadang terdapat permasalahan dalam penanganan arsip untuk keperluan seperti kekurangan arsip dari penerima, permasalahan dengan catatan yang menunjukkan kepemilikan hak yang sah, bentrokan batin atau perdebatan di kalangan keluarga penerima manfaat, serta masalah anggaran, dimana rentang waktu yang lama antara term 1 dan term 2 sering menyebabkan para pekerja pembangunan Program Dandan Omah mencari pekerjaan lain sambil menunggu term 2, sehingga perpanjangan secara teratur ditunda sebentar. Ketiga, ketepatan sasaran, pemeriksaan berdasarkan hipotesis ketepatan sasaran tampak bahwa Program Omah Dandan telah digariskan dan dilaksanakan dengan baik. Target intervensi yang dipilih sesuai dengan rencana dan tidak tumpang tindih dengan program lain, sehingga penerima manfaat siap menerima intervensi baik secara fisik maupun sosial, dan kebijakan ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya dengan pendekatan yang lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, program ini dapat dikatakan tepat sasaran dan berpotensi besar untuk mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas perumahan dan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Surabaya. Keempat, dalam hal implementasi program dandan omah di Kelurahan Bulak Banteng Kota Surabaya khususnya pada indikator ketepatan lingkungan memperoleh hasil bahwa lingkungan internal dan eksternal kebijakan telah terjalin dengan baik. Dimana dalam lingkungan internal kebijakan dibuktikan dengan interaksi yang terjalin oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan Kota Surabaya (DPRKPP) dengan Kelurahan Bulak Banteng dan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) Bulak Banteng, serta dari lingkungan eksternal kebijakan yang meliputi persepsi publik pada kebijakan ini.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai implementasi Program Dandan Omah di Kelurahan Bulak Banteng, terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program ini. Pertama, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan Kota Surabaya (DPRKPP) perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak kelurahan dan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) melalui pelatihan dan penyuluhan yang terstruktur untuk mengurangi masalah seperti dokumen yang tidak lengkap, perubahan usulan, dan konflik internal penerima manfaat. Kedua, pengelolaan anggaran harus lebih efisien, dengan memastikan dana termin 1 dan termin 2 dicairkan lebih cepat untuk mencegah tukang meninggalkan proyek dan mempercepat penyelesaian. Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan Program Dandan Omah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat di Kelurahan Bulak Banteng dan Kota Surabaya secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardi, Amirul, and Dian Rahmawati. 2019. "Arahan Penataan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kedungcowek Surabaya Menggunakan Konsep Land Readjustment."

- Jurnal Teknik ITS* 7 (2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i2.33914>.
- Azhari, Fadel M. 2022. "STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (Sdgs) DI PEKANBARU." *Cross-Border* 5 (1): 574–89.
- Darmadi, Dandi, Dimas Adhi Pramana Yusuf, Yulio Astria Yudha Firnanda, and Reynaldus Widya Nathanie. 2021. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Syntax Admiration* 2 (5): 806–18. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i5.226>.
- Gigih Agung Setyobudi, Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. 2024. "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kelurahan Genteng Kota Surabaya." *Publika Ilmu Administrasi Negara*, 253–63.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Intrans Publishing.
- Irwandi, and Endah R. Chotim. 2017. "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah, Dan Swasta." *Jispo* 7 (2): 24–42.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik : Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*. Vol. 6. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Kuntjorowati, Elly. 2021. "Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Berdampak Sosial Bagi Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 20 (3): 233–44.
- Kusumaningsih, Suci, Winny Astuti¹, and Erma Fitria Rini¹. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Terhadap Rusunawa Brujul." *Desa-Kota* 1 (1): 14–23. <http://jurnal.uns.ac.id/jdk>.
- Made, Ni, Oveta Annisya, and Alikha Novira. 2023. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Implementation of Program Keluarga Harapan at Kampung Seraya Village District of Batu Ampar Batam City" 26: 29–50.
- Mei, Glory, Sanada Silalahi, and Rahma Musyawah. 2024. "Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan : Studi Kasus Nelayan Tradisional Di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate." *Journal of Geographical Sciences and Education* 02 (1). <https://journal.pubsains.com/index.php/jgs/article/view/74>.
- Miles, Mathew B., A. Michael Huberman, Tjetjep Rohendi Rohidi, and Mulyarto. 2014. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Mugiarti. 2023. "Manajemen Yayasan Kita Peduli Banjarnegara Melalui Program Bedah Rumah." Uin
- Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Murdani, and Aditya. 2023. "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Dalam Upaya Penataan Permukiman Kumuh Di Kota Surabaya." *Jurnal Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila* 1 (8): 1- 17.
- Nugroho, Bonifasius Efsiko, and Galih Wahyu Pradana. 2021. "Peran Pemerintah Dalam

- Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Progam Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya.” *Publika* 9 (3): 155–66.
- Purwanti, Dian, Ira Irawati, Jossi Adiwisastra, and Herijanto Bekti. 2019. “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung.” *Jurnal Governansi* 5 (1): 12–23. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>.
- Rahmawati, Lutfia Diva, Program Studi, Administrasi Negara, Djoko Widodo, Program Studi, and Administrasi Negara. 2024. “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Terobosan Baru Kampung Madani Sebagai Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan Di Kota Surabaya Lutfia Diva Rahmawati Sumber : BPS Kota Surabaya,” no. 3: 42–55.
- Sari, Novia Silam, Indah Murti, and Dida Rahmadanik. 2022. “Implementasi Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujan dan Tak Takut Kepanasan) Guna Merahabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya.” *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* 25 (1): 1–12. <https://doi.org/10.30649/aamama.v25i1.135>.
- Setyawan, Jesica Angel Putri, and Ananta Prathama. 2024. “Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya (Studi Kasus Kelurahan Sawunggaling).” *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 7 (1): 70–87. <https://doi.org/10.36341/jdp.v7i1.3905>.
- Sindy Dwi Jayanti, Agus Suprijono, and M. Jacky. 2023. “Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Sejarah Di SMA Negeri 22 Surabaya.” *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4 (1): 561–66. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i1.304>.
- Triani, Yesi, Maya Panorama, and Rinol Sumantri. 2020. “Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11 (2):158. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.635>.